



## Transfer Fiskal Berbasis Ekologis (*Ecological Fiscal Transfer—EFT*): Menuntun desa dalam agenda pembangunan berkelanjutan

Kamis, 5 November 2020, 9:30 AM (WIB)

Desa adalah salah satu tingkatan pemerintahan terkecil di sistem pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi. Idealnya, target pembangunan berkelanjutan pemerintah dari tingkat pusat harus mengalir sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah. Contohnya, tujuan pembangunan berkelanjutan harus tercermin dalam rencana pembangunan desa. Namun, salah satu studi menunjukkan bahwa desa-desa di Kalimantan Timur tidak menjadikan program penggunaan lahan berkelanjutan sebagai bagian utama dari penganggaran mereka (CPI, 2018), kendati terdapat komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pertumbuhan hijau.

Saat ini, terdapat dorongan kuat dari koalisi masyarakat sipil untuk mengembangkan instrumen transfer fiskal yang akan memberikan penghargaan atau insentif fiskal kepada daerah yang mencapai tujuan ekologis berkelanjutan. Mekanisme ini sering disebut dengan *Ecological Fiscal Transfer (EFT)*. Meskipun telah banyak upaya perubahan selama dua tahun terakhir yang memberikan insentif fiskal atas pencapaian terkait kelestarian lingkungan, penting untuk hal ini didukung oleh metrik indikator yang jelas yang benar-benar dapat menunjukkan peningkatan dalam pembangunan keberlanjutan. Ada urgensi yang semakin meningkat, terutama selama resesi ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 ini, untuk memastikan bahwa program-program yang mendorong lingkungan dan ketahanan yang sehat untuk terus didukung.

Yayasan Cendekia Perubahan Iklim (*Climate Policy Initiative—CPI*) Indonesia berencana meluncurkan studi berjudul "*Indeks Desa Membangun Plus (IDM +): Indeks Penggunaan Lahan Berkelanjutan yang Memberikan Insentif Langsung ke Desa.*" Studi ini mengusulkan perubahan mekanisme transfer fiskal secara luas berdasarkan indeks pembangunan desa yang dimodifikasi untuk tujuan lingkungan. Usulan mekanisme ini relatif praktis untuk mendorong desa-desa di seluruh Indonesia mengadopsi praktek EFT. Studi ini mengarah pada dorongan untuk perubahan transformasional yang diperlukan bagi Indonesia untuk memenuhi tujuan ekonomi dan lingkungan secara menyeluruh.

Acara virtual berdurasi 90 menit ini dirancang untuk mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor keuangan publik dan lingkungan, membahas status penghijauan ekonomi Indonesia saat ini, dan membahas langkah solutif untuk membangun dan mewujudkan masa depan berkelanjutan Indonesia.

### Agenda

**09:30 – 09:35**

#### **PERKENALAN**

Tiza Mafira, Associate Director, Climate Policy Initiative

**09:35 – 09:50**

#### **SAMBUTAN**

**Ir. Rosyidah Rachmawaty, M.M** Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian



Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

**M. Windrawan Inantha**, *Senior Manager - Sustainable Palm Oil Program, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Indonesia*

09:50 – 10:05

**TEMUAN INTI: INDEKS DESA MEMBANGUN PLUS (IDM+): INDEKS PENGGUNAAN LAHAN BERKELANJUTAN YANG MEMBERIKAN INSENTIF LANGSUNG KE DESA**

Bruce Mecca, *Climate Policy Initiative*

10:05 – 10:55

**DISKUSI PANEL – IDM+: MENUNTUN DESA DALAM AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

- **Joko Tri H**, *Fungsional Peneliti, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*
- **Bito Wikantosa**, *Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*
- **Ilyas Natsir** *Kepala DPMK Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur*
- **R. Alam Surya Putra**, *Deputy Director of Environmental Governance Unit, The Asia Foundation*
- **Maya Rostanty**, *Senior Advisor, PATIRO*
- **Luthfyana Larasati**, *Senior Analyst, Climate Policy Initiative (Moderator)*

10:55 – 11:00

**KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Tiza Mafira, *Associate Director, Climate Policy Initiative*